

Dinamika Akuntabilitas Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Bali Dalam Perspektif *Good Governace*

The Dynamics Of Accountability Of The Bali Provincial Financial And Development Supervisory Agency In The Perspective Of Good Governance

I Wayan Tu Adi^{1*}, AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda²

¹ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional

² Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

*Wayantuadi21@gmail.com

ABSTRAK

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini mengangkat tema dinamika akuntabilitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali dalam kerangka *Good Governace*. Dengan penekanan pada pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan dan pembangunan, penelitian ini mengeksplorasi latar belakang yang mendasari, merumuskan permasalahan yang dihadapi, menetapkan tujuan dan manfaat laporan, serta menyajikan hasil pelaporan pekerjaan beserta analisis mendalamnya. Melalui telaah yang komprehensif, ditemukan bahwa Badan Pengawasan memiliki peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Sebagai kesimpulan, diperlukan sinergi yang lebih kokoh antar lembaga serta peningkatan mekanisme evaluasi guna meningkatkan tata kelola yang baik. Saran yang diusulkan mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, dan peningkatan efektivitas serta efisiensi lembaga pengawasan keuangan dan pembangunan.

Kata kunci — Akuntabilitas, *Good Governace*, Pengawasan

ABSTRACT

This Field Work Practice report raises the theme of the dynamics of accountability of the Bali Provincial Financial and Development Supervisory Agency within the framework of *Good Governace*. With an emphasis on the importance of transparency and accountability in financial and development supervision, this research explores the underlying background, formulates the problems faced, sets the objectives and benefits of the report, and presents the results of the reporting work along with in-depth analysis. Through a comprehensive review, it was found that Supervisory Bodies have a crucial role to play in ensuring accountability and transparency in financial and development oversight. In conclusion, stronger synergies between agencies and improved evaluation mechanisms are needed to enhance good governance. Suggestions include increasing public participation, upholding the rule of law, and improving the effectiveness and efficiency of financial and development oversight institutions.

Keywords — Accountability, *Good Governace*, Supervision

1. Pendahuluan

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dalam menghadapi kebutuhan zaman. *Link and Match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bekerja secara langsung, secara sistematis dan terarah dengan supervisi yang kompeten. Praktik Kerja Lapangan juga dapat menjadi sarana memperluas koneksi, dengan PKL mahasiswa dapat berhubungan baik dengan karyawan instansi sehingga setelah lulus mahasiswa akan mendapatkan informasi tentang lingkungan pekerjaan dari instansi tersebut, dengan mengantongi pengalaman magang di instansi yang sama akan menjadi nilai tambah.

Melihat pentingnya mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini, penulis memanfaatkan kesempatan baik tersebut dengan melakukan praktik kerja di kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali. Badan Pengawasan Keuangan

dan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan BPKP.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bahwa sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menunjukkan keseriusan Presiden serta pemerintah dalam meningkatkan pengawasan intern dari pemerintah atas setiap kegiatan/pembangunan dan pengelolaan anggaran di Indonesia.

Menurut [1] Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencerminkan perkembangan panjang lembaga pengawasan di Indonesia, dimulai dengan pembentukan Djawatan Akuntan Negara (DAN) pada tahun 1936 untuk meneliti pembukuan perusahaan negara. Seiring waktu, DAN berkembang menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada



tahun 1966, yang mengawasi anggaran negara dan daerah. Pada tahun 1983, DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan fungsi pengawasan yang lebih leluasa. Reposisi dan revitalisasi pada tahun 2006 dan 2014 menegaskan peran BPKP dalam mengawasi keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dengan pendekatan preventif, audit investigatif, dan peningkatan good governance melalui berbagai kerja sama strategis.

Melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam sejarah dalam upaya pengoptimalan pengawasan intern oleh pemerintah sampai saat ini adanya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Berdasarkan Penerapan prinsip-prinsip good governance diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah, mengurangi korupsi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan meningkatkan hasil pembangunan daerah[2]. serta penulis memiliki kesempatan yang baik dapat melakukan praktik kerja lapangan di BPKP perwakilan Provinsi Bali, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam akuntabilitas pengawasan keuangan dan pembangunan yang diterapkan dengan tulisan hasil penelitian yang berjudul “Dinamika Akuntabilitas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali dalam Perspektif Good Governance”

2. Target dan Luaran

Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa melalui pengalaman langsung di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Dengan fokus pada memperluas pengetahuan mahasiswa tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPKP, serta meningkatkan keterampilan dalam memahami disiplin kerja, hubungan sosial, dan batasan-batasan di lingkungan kerja BPKP. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk meningkatkan koneksi antara mahasiswa dengan karyawan instansi, sehingga mahasiswa dapat memperoleh informasi yang berguna terkait lingkungan kerja dan karir di masa depan. Luaran yang diharapkan dari pengabdian ini mencakup laporan hasil pengabdian yang mencakup analisis tentang pengalaman mahasiswa selama PKL di BPKP Provinsi Bali, publikasi artikel mengenai manfaat dan relevansi PKL di BPKP Provinsi Bali bagi mahasiswa dan institusi terkait, peningkatan kompetensi mahasiswa dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, serta peningkatan kerjasama antara perguruan tinggi dengan institusi terkait, seperti BPKP, dalam hal penyelenggaraan PKL dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan demikian, diharapkan pengabdian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi mahasiswa, institusi terkait, dan masyarakat secara keseluruhan.



3. Metodologi

Program pengabdian dalam kegiatan praktek Kerja Lapangan dilaksanakan selama 43 hari Pada tanggal 10 Juni s/d 9 Agustus 2024 Metodologi penelitian yang digunakan Pertama, identifikasi tujuan utama dari pengabdian, yang dalam hal ini adalah meningkatkan kualitas Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa. Kedua, analisis mendalam terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali sebagai institusi yang menjadi fokus pengabdian, termasuk pemahaman terhadap struktur, tugas, dan fungsi BPKP untuk menyesuaikan kegiatan pengabdian. Selanjutnya, pengembangan kerjasama yang efektif dengan BPKP Provinsi Bali untuk melaksanakan kegiatan PKL yang relevan dengan tuntutan dunia kerja dan kebutuhan industri. Perencanaan kegiatan PKL yang melibatkan penyusunan kurikulum dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan BPKP dan mahasiswa juga menjadi bagian penting dalam metodologi ini. Implementasi kegiatan PKL dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun, dengan memastikan mahasiswa mendapatkan pengalaman yang mendalam dan relevan selama PKL. Evaluasi berkala terhadap proses PKL dilakukan untuk memastikan kualitas dan relevansi pengalaman yang diperoleh mahasiswa, serta mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Terakhir, diseminasi hasil pengabdian dilakukan melalui publikasi artikel,

seminar, atau forum diskusi, serta kampanye edukasi tentang pentingnya PKL dan manfaatnya bagi mahasiswa dan institusi terkait. Dengan demikian, metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas PKL mahasiswa dan hubungan antara perguruan tinggi dengan institusi terkait.



Gambar 1. Foto Kegiatan PKL di BPKP Bali

4. Pembahasan

1.1 Analisis Permasalahan

Pengawasan sebagai bentuk dari kontrol merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Akuntabilitas ke atas (accountability upwards) dan akuntabilitas kepada staff (accountability to staff) merupakan konsep yang mirip dengan konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian yang dikenal pada birokrasi publik. Terdapat empat sumber kontrol yang dapat menjamin akuntabilitas birokrasi yaitu kontrol yang bersumber pada hierarki dan profesional (sumber kontrol internal birokrasi) dan kontrol yang bersumber pada hukum dan politik (sumber kontrol eksternal birokrasi). Akuntabilitas adalah suatu konsep etika yang sangat dekat dengan administrasi publik

pemerintahan (eksekutif pemerintah, legislatif parlemen, dan yudikatif) yang mempunyai beberapa istilah, seperti dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness), dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan yang dapat menerangkan salah satu aspek dan administrasi publik pemerintah[3].

Peran Akuntabilitas dalam Pengawasan Intern sangat penting dalam isu-isu Strategis yang ada di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menerapkan sistem pengendalian internal. Tujuan dari adanya Sistem Pengendalian Internal pemerintah adalah agar bisa mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien dan ekonomis, dengan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap menjaga keamanan aset yang dimiliki. Salah satu masalah yang masih menjadi sorotan penting ialah Korupsi.

Pada tahun 2023 skor indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan Transparency International Corporation berada di angka 34 (urutan 115 dari 180 negara) berdasarkan indikator nol (0 – sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Banyaknya kasus korupsi yang belakangan ini terjadi di Indonesia dari tahun 2019 – 2023 berdasarkan data Indonesia Corruption Watch terjadinya peningkatan jumlah

kasus yang terjadi pada tahun 2023 ditemukan 791 kasus dan 1.695 tersangka, dari dua kasus tersebut kasus yang tertinggi bersumber dari 277 kasus Kegiatan/Proyek Fiktif, 259 kasus penyalahgunaan anggaran. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Pada tahun 2023, nilai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,92; sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022 (3,93) nilai berkisar skala 0-5, semakin mendekati lima semakin baik. Serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 dengan skor indeks 70,97 dari skala 0-100. Skor ini mengalami penurunan dari capaian tahun sebelumnya dengan skor indeks 71,94.

Penurunan indeks perilaku anti korupsi dan nilai integritas yang menurun serta urutan negara yang tekorup diperlukannya perhatian khusus dari kasus korupsi yang tahun ketahun semakin tinggi terutama dalam kasus kegiatan/proyek fiktif serta penyalahgunaan anggaran perlunya perhatian khusus dari badan yang mengawasi keuangan dan pembangunan. Hal ini diupayakan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Salah satu penyimpangan yang masih sering terjadi adalah lemahnya pengendalian yang dilakukan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan serta masih terdapat penyelewengan dana yang digunakan untuk kegiatan diluar rencana pembangunan[4].



Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 menimbang bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah, perlu menata kembali organisasi dan tata keda Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bahwa sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Menunjukkan keseriusan Presiden serta pemerintah dalam meningkatkan pengawasan intern dari pemerintah atas setiap kegiatan/pembangunan dan pengelolaan anggaran di Indonesia

Menurut Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencerminkan perkembangan panjang lembaga pengawasan di Indonesia, dimulai dengan pembentukan Djawatan Akuntan Negara (DAN) pada tahun 1936 untuk meneliti pembukuan perusahaan negara. Seiring waktu, DAN berkembang menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada tahun 1966, yang mengawasi anggaran negara dan daerah. Pada tahun 1983, DJPKN

ditransformasikan menjadi BPKP, lembaga non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dengan fungsi pengawasan yang lebih leluasa. Reposisi dan revitalisasi pada tahun 2006 dan 2014 menegaskan peran BPKP dalam mengawasi keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dengan pendekatan preventif, audit investigatif, dan peningkatan good governance melalui berbagai kerja sama strategis.

Peran BPKP sebagai auditor internal yang diperlukan untuk melakukan pengawalan rancangan keuangan dan akuntabilitas Presiden (RKAP), membantu Presiden dalam rangka mewujudkan akuntabilitas nasional dan daerah, serta membina APIP pada tingkat Inspektorat Daerah, Inspektorat Jenderal, dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D)[5]. Demi meningkatkan pengawasan ke daerah sebagai bentuk penerapan otonomi daerah dan desentralisasi Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) memiliki perwakilan ke seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki tantangan dalam pengawasan. Salah satunya di provinsi Bali yang terkenal dengan pariwisata dan kebudayaan yang ada. Kuatnya pengaruh wisata dan budaya membuat tantangan dan peluang yang besar ada di provinsi Bali. Peluang yang ada dari pemanfaatan pariwisata dan budaya merupakan hal utama menguatkan perekonomian dan pembangunan dibali sebaliknya tantangan dari pesatnya pariwisata dan kuatnya budaya menjadi tantangan yang



sulit dalam mengawasi keuangan dan pembangunan pembangunan yang ada di Bali.

5. Pembahasan

Capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali merupakan bagian dari kinerja BPKP sehingga diharapkan dengan tercapainya target-target kinerja akan mendukung tercapainya visi BPKP bagi Pemerintah yakni "Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong".

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali memiliki peran penting dalam meningkatkan Good Governance sektor publik. Terutama dalam peningkatan akuntabilitas Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan provinsi Bali, Dapat disebutkan bahwa prinsip – prinsip Good Governance yang menjadi penunjang keberhasilan konsep adalah partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan visi yang strategis. United Nation Development Program (UNDP) juga menyebutkan bahwa penerapan good governance merupakan aset penting dalam pemerintahan, yaitu untuk membawa sebuah negara menjadi efektif, efisien, responsif, bebas korupsi, dan ramah terhadap warga negaranya[5].

Dinamika Akuntabilitas yang terjadi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan provinsi Bali dari perspektif Good Governance yaitu BPKP Bali berupaya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dengan melakukan audit yang terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait. Laporan hasil audit BPKP biasanya dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat luas, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana dana publik dikelola. Namun dari data yang sudah di publish secara luas masyarakat masih banyak yang kurang peduli terkait laporan tersebut yang menjadikan trenparansi yang berjalan namun tidak adanya respon dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya transparansi inilah yang akan menjamin akses dan kebebasan untuk semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pengelolaan pemerintahan desa diselenggarakan, yang didalamnya mengenai informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan bagaimana pelaksanaannya serta hasil hasil yang dicapai[6]. BPKP Bali memastikan bahwa setiap instansi pemerintah di wilayah Bali bertanggung jawab atas penggunaan anggaran yang telah diberikan. Melalui audit dan evaluasi, BPKP Bali memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dijalankan oleh instansi terkait. Selain itu, BPKP Bali juga memantau tindak lanjut dari rekomendasi yang telah diberikan. Berdasarkan akuntabilitas catatan tanggung jawab tugas yang dilakukan BPKP



provinsi Bali Berdasarkan Laporan Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Bali tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja BPKP. Laporan Kinerja ini merupakan periode pelaporan keempat dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra BPKP 2020-2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dari 35 IKK yang diukur pada tahun 2023 sebanyak 34 IKK mencapai kinerja $\geq 100\%$ dan satu IKK mencapai kinerja Permasalahan yang ada di BPKP Bali.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP Bali juga melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan masukan dan umpan balik terkait pengelolaan keuangan daerah. Partisipasi masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa pengawasan berjalan secara objektif dan transparan. Efektivitas dan Efisiensi: BPKP Bali berusaha memastikan bahwa setiap program pemerintah yang didanai oleh APBD atau APBN berjalan secara efektif dan efisien. Dengan melakukan audit kinerja, BPKP Bali dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program-program tersebut. Namun terdapat beberapa pengendalian risiko yang belum memadai oleh BPKP yang meliputi Terdapat 75 point risiko yang dihadapi BPKP Bali pada tahun 2023 terdapat 7 pengendalian risiko yang tidak memadai meliputi Auditor tidak berhasil memberikan rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan dalam penugasan

Assurance (Audit, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan). Terdapat resistensi Mitra Kerja BPKP terhadap perubahan regulasi. Kurangnya Komitmen Pimpinan pada Pemerintah Daerah untuk Mencapai IEPK Level Baik. Komitmen Kepala Daerah dan/atau Pimpinan APIP masih kurang dalam hal peningkatan kapabilitas APIP. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder). Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder). Stakeholder terlambat menyampaikan data/tanggapan

Adapula tantangan dan hambatan yang terjadi di BPKP provinsi Bali yaitu Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh BPKP Bali adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial untuk melakukan pengawasan yang menyeluruh dan mendalam. Regulasi yang kompleks dan sering berubah-ubah Berdasarkan penetapan tugas dan tanggung jawab secara rinci mengalami perkembangan karena adanya perubahan terbaru demi mengoptimalkan tugas dan fungsi Dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023, terdapat perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 yang mengatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.



Beberapa poin utama perubahan yang terdapat meliputi:

1. Perumusan kebijakan nasional terkait pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional.
3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis.

Perubahan regulasi yang terjadi memiliki tujuan yang baik namun terkadang akan menjadi tantangan bagi setiap instansi dalam beradaptasi selain itu terdapat resistensi dari instansi pemerintah yang diaudit terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. Hal ini dapat menghambat proses perbaikan yang diusulkan seperti yang disampaikan dalam point efektif dan efisien Terdapat terdapat pengendalian risiko yang belum memadai seperti resistensi Mitra Kerja BPKP terhadap perubahan regulasi. Kurangnya Komitmen Pimpinan pada Pemerintah Daerah untuk Mencapai IEPK Level

Baik. Komitmen Kepala Daerah dan/atau Pimpinan APIP masih kurang dalam hal peningkatan kapabilitas APIP. Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder). Hasil Kegiatan Consulting (Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Sosialisasi) tidak diimplementasikan oleh mitra kerja (stakeholder). Stakeholder terlambat menyampaikan data/tanggapan

1.2 Solusi Permasalahan

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merespons laporan audit, BPKP Bali dapat mengadakan kampanye edukasi yang menekankan pentingnya laporan tersebut dan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi. Mengadakan forum diskusi atau seminar yang melibatkan masyarakat, LSM, dan akademisi juga bisa menjadi cara efektif untuk mengumpulkan umpan balik. Pemanfaatan media sosial dan teknologi informasi dapat membantu menyebarkan informasi dengan lebih luas dan memudahkan masyarakat memberikan masukan.

Menghadapi keterbatasan sumber daya, BPKP Bali dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi auditor melalui pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesional. Kerjasama dengan instansi pengawasan lainnya juga dapat membantu dalam berbagi sumber daya dan informasi. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan analitik data dapat meningkatkan efisiensi proses audit,



memungkinkan pengawasan yang lebih menyeluruh dengan sumber daya yang ada.

Kompleksitas regulasi sering menjadi tantangan dalam proses audit. Untuk mengatasi hal ini, BPKP Bali dapat melakukan kajian regulasi secara berkala dan mengusulkan penyesuaian regulasi untuk mengurangi kompleksitas. Sosialisasi dan pelatihan mengenai perubahan regulasi terbaru bagi auditor dan instansi terkait juga penting. Implementasi sistem informasi hukum yang dapat diakses oleh auditor akan memudahkan pemahaman dan penerapan regulasi.

Resistensi dari instansi pemerintah yang diaudit terhadap rekomendasi BPKP bisa diatasi dengan pendekatan persuasif yang menjelaskan manfaat dan pentingnya rekomendasi tersebut. Pembinaan dan asistensi secara intensif kepada instansi terkait akan membantu mereka menerapkan rekomendasi dengan lebih baik. Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan implementasi rekomendasi serta memberikan dukungan jika diperlukan.

Meningkatkan komitmen pimpinan pemerintah daerah untuk mencapai IEPK level baik dan meningkatkan kapabilitas APIP dapat dilakukan melalui dialog dan konsultasi yang menjelaskan pentingnya pencapaian tersebut. Pemberian insentif atau penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan kapabilitas APIP dan mencapai IEPK level baik dapat memotivasi mereka. BPKP Bali juga dapat membantu pemerintah daerah menyusun

rencana aksi konkret dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut.

Agar hasil kegiatan consulting (bimbingan teknis, asistensi, dan sosialisasi) diimplementasikan oleh stakeholder, penting untuk melibatkan mereka sejak awal proses konsultasi. Pendampingan intensif dalam mengimplementasikan hasil kegiatan consulting dan evaluasi berkala dengan feedback konstruktif dapat memastikan implementasi yang lebih efektif. Dengan solusi-solusi ini, BPKP Bali diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dan lebih efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

6. Kesimpulan

6.1 Kesimpulan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali (BPKP Bali) memegang peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di instansi pemerintah di wilayah Bali. Melalui kegiatan audit yang teliti, evaluasi yang mendalam, dan pemberian rekomendasi perbaikan yang konstruktif, BPKP Bali bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam konteks Good Governance, keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi kunci



utama dalam memastikan transparansi dan objektivitas dalam proses pengawasan keuangan daerah. Meskipun BPKP Bali telah melakukan upaya untuk mempublikasikan laporan hasil auditnya guna memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat, terdapat tantangan terkait kurangnya respons dari masyarakat terhadap laporan tersebut, yang mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memahami dan mengawasi pengelolaan dana publik.

Tantangan yang dihadapi oleh BPKP Bali, seperti kompleksitas regulasi yang sering menjadi hambatan dalam proses audit, resistensi dari instansi pemerintah terhadap rekomendasi yang diberikan, serta kurangnya komitmen dari pimpinan Pemerintah Daerah untuk mencapai Indeks Efektivitas Pengawasan Keuangan (IEPK) Level Baik, Dalam melaksanakan fungsinya pengawasan berupa suatu kegiatan yang diperlukan adanya dukungan dari semua kinerja[7], maka akan didapat efektif dan optimal dalam menjalankan semua kegiatan menuntut pendekatan yang lebih persuasif, kajian regulasi yang teratur, dan peningkatan komitmen serta kesadaran dari semua pihak terkait. Diperlukan upaya kolaboratif yang kuat antara BPKP Bali, instansi pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan implementasi rekomendasi yang diberikan, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.

6.2 Saran

Untuk Perusahaan/Instansi tempat PKL:

- Disarankan untuk tidak hanya melakukan kajian regulasi secara berkala, tetapi juga mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan untuk mengurangi kompleksitas regulasi yang menjadi hambatan.
- Perlu dilakukan pendekatan persuasif yang lebih proaktif terhadap instansi pemerintah yang resisten terhadap rekomendasi, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai manfaat dan urgensi implementasi rekomendasi.

Untuk Perguruan Tinggi:

- Diperlukan peningkatan kualitas PKL dengan memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman yang relevan dan mendalam sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang.
- Kerjasama dengan instansi terkait perlu diperkuat untuk memastikan bahwa kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan industri dan mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar kerja.
- Evaluasi secara berkala terhadap proses belajar mengajar perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perguruan tinggi mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan industri dan masyarakat.

7. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih dari penulis disampaikan kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mendukung dan memfasilitasi



penulisan serta pelaksanaan pengabdian ini. Terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali atas kesempatan dan kerjasama yang diberikan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa. Terima kasih juga kepada dosen pembimbing dan staf pengajar yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses pengabdian ini.

[7] E. A. Lehot, L. K. Datrini, and I. B. M. P. Manuaba, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Internal Pemerintah Daerah Pada Bpkp Ri Perwakilan Provinsi Bali," *WICAKSANA J. Lingkung. dan Pembang.*, vol. 5, no. 2, pp. 81–86, 2021, doi: 10.22225/wicaksana.5.2.2021.81-86.

8. Daftar Pustaka

- [1] N. C. Felencia, "Pengawasan dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Keuangan Negara Berdasarkan Peraturan BPKP," *Law, Dev. Justice Rev.*, vol. 5, no. 2, pp. 213–227, 2022, doi: 10.14710/ldjr.v5i2.17214.
- [2] A. A. Sungkar, "Efektifitas Dan Akuntabilitas Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah," *J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos. Hum.*, vol. 3, no. 3, pp. 200–205, 2023.
- [3] Z. Ariefandi, H. Prasetyo, and T. Syahrul Ansari, "UPAYA AKUNTABILITAS DISKRESI PEMERINTAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 Zulfi Ariefandi Prodi Hak Asasi Manusia and Good Governance , Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia Hari Prasetyo Prodi Hak Asasi Manusia and Good Governance , Fakultas P," *J. Ilm. Keagamaan dan Kemasyarakatan*, vol. 17, no. 6, pp. 4142–4156, 2023.
- [4] A. Ambarwati, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah dengan Pemanfaatan Accounting Information System sebagai Pemoderasi," *J. Bus. Econ. UPI YPTK*, vol. 6, no. 3, pp. 88–96, 2021, doi: 10.35134/jbeupiyptk.v6i3.128.
- [5] P. Badan and P. Daerah, "Pengendalian Intern Terhadap Tata Kelola," vol. 3, no. 4, pp. 54–63, 2023.
- [6] A. Majid and J. Yogopriyatno, "PERAN STAKEHOLDER UNTUK MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus di Desa Tunggang Kabupaten Mukomuko)," *J. Gov. dan Adm. Publik*, vol. 6, no. 1, pp. 1–10, 2022, doi: 10.33369/jgoap.v6i1.21408.

